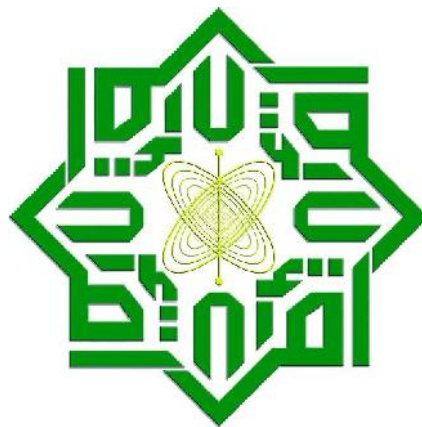


SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN AGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA)**



DISUSUN OLEH :

**MA'AT
10573002075**

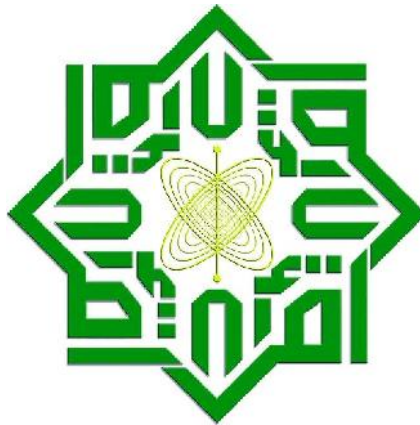
**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1432 H/ 2012**

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



DISUSUN OLEH :

**MA'AT
10573002075**

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1432 H/ 2012**

ABSTRAKS

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris Pada Kabupaten Siak)

NAMA : MA'AT

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap kinerja aparat pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Penelitian ini melibatkan 71 responden dengan jabatan eselon III dan eselon IV pada 20 badan / dinas / kantor yang ada di pemerintah daerah kabupaten siak. Data di peroleh melalui penyebaran kuisisioner secara langsung ke objek penelitian. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan uji independen sampel T test dengan bantuan spss 17.0for windows.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwabudgetary goal characteristicsmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moderating komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubunganbudgetary goal characteristics dengan kinerja aparat pemerintah daerah

Kata kunci : Karakteristik Tujuan Anggaran, kinerja dan komitmen organisasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTER ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan masalah.....	9
I.3. Tujuan dan manfaat penelitian	9
I.4. Sistematika penulisan.....	10

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pengertian anggaran.....	12
II.2 Tujuan anggaran	13
II.3 Anggaran sektor publik.....	14
II.4 <i>Budgetary goal characteristics</i>	20
II.5 Kinerja aparat pemerintah daerah	27
II.6 Komitmen Organisasi	31
II.7 Pendekatan kontinjensi	33
II.8 Kerangka konseptual.....	34
II.9 Penelitian terdahulu	36
II.10 Hipotesis penelitian.....	37
II.11 Model penelitian	38

BAB 111 POPULASI DAN SAMPEL

III.1 Lokasi dan waktu penelitian	39
III.2 Populasi dan sampel	39
III.3 Pengukuran variabel	42
III.4 Komitmen organisasi.....	44
III.5 Teknik pengumpulan Data	45
III.6 Analisis Data	46
III.7 Uji Asumsi Klasik	47
III.8 Pengujian Hipotesis	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Deskripsi dan Analisis Data	51
IV.2. Statistik Deskriptif	53
IV.3. Pengujian Kualitas Data	54
IV.4. Pengujian Normalitas Data	59
IV.5. Pengujian Asumsi Klasik	60
IV.6. Model Penelitian yang digunakan	63
IV.7. Pengujian Hipotesis dan pembahasan	65
IV.8. Pengujian Hipotesis pertama	65
IV.9. Pengujian Hipotesis kedua	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan	68
V.2 Saran	69
V.3 Daftar pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel Penelitian	41
Tabel IV. 1 Tingkat partisipasi objek penelitian dan tingkat pengembalian kuesioner	52
Tabel IV. 2 Demografi Responden	53
Tabel IV. 3 Statistik Diskriptif.....	53
Tabel IV. 4 Validitas Instrumen budgetary goal characteristics	56
Tabel IV. 5 Validitas Instrumen kinerja pemerintah Daerah	57
Tabel IV. 6 Validitas Instrumen kinerja pemerintah Daerah	58
Tabel IV. 7 Validitas Instrumen kinerja pemerintah Daerah	59
Tabel IV. 8 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel IV. 9 Nilai Durbin Watson.....	62
Tabel IV. 10 Hasil Analisa Regresi Metode Enter	63
Tabel IV. 11 Variabel/ Removed (b)	64
Tabel IV. 13 Hasil pengujian masing-masing Hipotesis	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001), selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004, kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dan pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah pusat ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan wujud dan penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan PP Nomor 58 tahun 2005. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan akhir-akhir ini terutama sejak munculnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikeluarkan pemerintah mulai membengkak, namun tampaknya masyarakat belum cukup puas atas kualitas pelayanan maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih belum dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif. Sehingga diberlakukannya anggaran berbasis

kinerja sangat membantu dalam mewujudkan transparansi hasil kinerja instansi pemerintah.

Kinerja adalah hasil karya seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya atau jawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan secara legal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Titik berat ukuran kinerja harus berdasarkan pada tujuan serta nilai tambah (valueadded) dalam kaitanya dengan penilaian kinerja, anggaran akan membantu sistem pengendalian, dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi. Kemudian jika ada penyimpangan yang terjadi, akan dianalisis sebab-sebabnya dan siapa yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Dalam pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan anggaran perlu adanya perbandingan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. sehingga diperlukan peran-peran akuntabilitas pemerintah yang diharapkan dapat memberikan transparansi pada masyarakat atas hasil dan kinerja pemerintah selama ini.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai agency teory

yang mana pemerintah sebagai agen dan DPRD sebagai principal. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan element penting dalam sistem pengendalian management karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.

Kenis (1979) dalam Kurnia (2004) menyimpulkan bahwa variasi dalam *Budgeting Style* dan *upper Management* seperti yang direfleksikan dalam karakteristik tujuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dari *Lower Level Manager*.

Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif (Kenis, 1979) menyatakan penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan 5 dimensi budgeting goal characteristics (karakteristik tujuan anggaran) yaitu: budgeting participations (partisipasi anggaran), *budget goal clarity* (kejelasan sasaran anggaran), *budgeting feedback* (umpan balik anggaran), *budgeting evaluation* (evaluasi anggaran) and *budgeting goal difficulty* (kesulitan anggaran).

Partisipasi anggaran berkaitan dengan sejauh mana bawahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jika informasi yang diberikan oleh bawahan tidak bisa, maka anggaran yang dihasilkan dalam proses penyusunan anggaran akan dapat dicapai secara optimal.

Kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Umpan balik anggaran merupakan hasil yang diperoleh dan upaya untuk mencapai sasaran sebagai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan.

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan untuk evaluasi kinerja.

Kesulitan sasaran anggaran menunjuk pada sejauh mana tingkat tujuan anggaran dapat dicapai. Semakin sulit tujuan anggaran dicapai maka semakin tinggi tingkat ketegangan kerja dan sebaliknya, semakin longgar tujuan suatu anggaran maka individu tidak mempunyai tantangan dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian mengenai pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap kinerja telah dilakukan oleh banyak peneliti. Namun penelitian-penelitian tersebut belum mendapatkan hasil yang konsisten.

Penelitian Maryanti (2002), sebagaimana yang dikatakan oleh Munawar (2006), merupakan pengembangan dari penelitian Kenis (1979), yaitu tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap dan kinerja

aparatus pemerintah daerah diprovinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perbedaan dari penelitian Maryanti (2002), dengan penelitian Kenis (1979), adalah pada variabel dependen yaitu Maryanti menambah variabel perilaku sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independent sama seperti penelitian Kenis (1979) dengan populasi dan sampelnya berbeda pula yaitu Kenis (1979) populasinya adalah manajer tingkat menengah pada *sector privat*, sedangkan Maryanti (2002) populasinya aparatus pemerintah daerah pada sektor publik. Hasil penelitian Maryanti menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap aparatus pemerintah di provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan sikap aparatus pemda NTT dalam menyusun dan melaksanakan anggaran adalah cukup positif. Variabel lain seperti partisipasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku dan sikap aparatus pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Disisi lain, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatus pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparatus pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi rendah.

Munawar (2006) juga mencoba melihat pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap kinerja dan aparatus pemda yang merupakan pengembangan dari penelitian Maryanti (2002) dengan objek penelitian dan alat

analisis yang digunakan adalah berbeda namun variabel yang diteliti adalah sama. Hasil penelitian Munawar (2006) adalah bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah.

Kurnia (2004) mencoba melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh budaya paternalistik dan komitmen organisasi pada budgetary goal characteristic dan kinerja managerial pada perguruan tinggi swasta kopertis wilayah III. Penelitian Kurnia (2004) menunjukkan bahwa budaya paternalistik dan komitmen organisasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja managerial. Budaya paternalistik dan komitmen organisasi bukan merupakan kesesuaian terbaik dan tidak mampu bertindak. Sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara kelima dimensi karakteristik tujuan anggaran dan kinerja managerial.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja. Fahrianta dan Ghazali (2006) dan Rianto (2003) dalam Suhertono (2006) dan Solichin (2006) mengatakan kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian mengenai anggaran dan implikasinya, disebabkan adanya faktor-faktor tertentu (*situation al factors*) atau yang lebih dikenal dengan istilah variabel kontijensi (*contingency variables*) atau pendekatan kontijensi. Model penelitian tersebut untuk menguji *contextual factors* yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan

kinerja. System pengendalian termasuk anggaran dan pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel intervening atau variabel moderating (Darma, 2004).

Mengingat pentingnya peranan anggaran bagi organisasi dan akibat yang ditimbulkan dari penurunan penilaian kinerja, maka hubungan antara kinerja dengan variabel-variabel lain, khususnya variabel yang dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial perlu diteliti kembali.

Dalam penelitian ini penulis mengusulkan komitmen organisasi sebagai variabel moderating karena komitmen organisasi diperkirakan dapat mempengaruhi hubungan karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja. Manajerial yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai anggaran dan kinerja pemerintah daerah dengan judul : Pengaruh karakteristik tujuan anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik tujuan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten siak?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran pada organisasi (instansi) pemerintah.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan agar memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan peneliti dalam hubungan *antara* karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi setiap organisasi khususnya pemerintah daerah untuk memperhitungkan pengaruh faktor-faktor dalam rangka penyusunan anggaran dan peningkatan kinerja.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi skripsi ini dalam lima bab, yang masing-masing bab akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut seperti berikut:

Bab I : Bab ini merupakan bab pembukaan dari bab-bab yang lainnya, berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori pendukung sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisis, beserta hipotesis-hipotesisnya.

Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan tentang dalam pengumpulan data, pemilihan sampel, pengukuran variabel, pengukuran instrumen, dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Bab ini merupakan bab hasil penelitian dari pembahasan, pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian hasil penelitian ini yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian, dan saran-saran untuk perbaikan penilain berikutnya untuk judul penelitian yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Anggaran

Anggaran telah banyak sekali didefinisikan oleh para ekonomi, tetapi dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat maksud dan tujuan yang sama, yaitu sebagai suatu rencana tertulis yang dibuat oleh perusahaan operasi mengenai kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Nafarin (2004: 12) mengemukakan definisi anggaran adalah sebagai berikut:

Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk dalam jangka waktu tertentu Sedangkan menurut Mulyadi (2001 : 488), Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang di ukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satuan tahun.

Mulyadi (2001: 490) menambahkan bahwa anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d. Mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- e. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
- f. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.
- g. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana manajemen dalam bentuk angka (kuantitatif) selama periode tertentu untuk masa yang akan datang.

II.2 Tujuan Anggaran

Menurut Narfarin (2004 :15), secara spesifik tujuan disusunnya anggaran antara lain:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan;
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan;
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

II.3 Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Bastian (2001:164) mendefenisikan anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Mardiasmo (2002:62) mengemukakan defenisi anggaran publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapat, belanja dan aktifitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dan masyarakat. Pada sektor publik perdanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi

pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bententangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja).
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade offs.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik

merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002 : 63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
- b. Alat pengendalian (*Control tool*)
- c. Alat penilaian kinerja Alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
- d. Alat politik (*political tool*)
- e. Alat koordinasi dan komunikasi (*Alat coordination and communication tool*)
- f. Alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
- g. Alat motivasi (*motivation tool*)
- h. Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/ DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Menurut Bastian (2001 : 164) fungsi-fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran sebagai alat komunikasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian

- e. Anggaran merupakan instrumen politik. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal

3. Jenis - Jenis Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002 : 66) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, megemukakan jenis-jenis anggaran sektor publik sebagai berikut:

- a. Anggaran Operasional (*Operation/recurrent budget*)

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja Rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

- b. Anggaran modal / Investasi (*capital/investment budget*)
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap.

4. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip anggaran sektor publik menurut Bastian (2005:178) adalah:

- a. Demokratis, berarti anggaran yang disusun harus melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat
- b. Adil berarti anggaran harus secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara profesional
- c. Transparan, berarti proses perencanaan, pelaksanaan dan bertanggung jawab anggaran harus diketahui tidak hanya wakil, tetapi juga masyarakat umum
- d. Bermoral tinggi, berarti pengolahan anggaran harus berpegang pada peraturan UU yang berlaku
- e. Berhati-hati, pengelolaan anggaran dilakukan secara berhati-hati karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya
- f. Akuntabel, berarti pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat

5. Mekanisme/ Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lahirlah 3 paket perundang-undangan, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan UU sistem perencanaan pembangunan nasional, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengaturan keuangan, khususnya perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran sektor publik atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendapatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama legislatif daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk ketentuan-ketentuan

umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang diinuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama dalam satu tahun (PP Nomor 58 tahun 2005).

Dalam penyusunan anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjangkaran informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai mana program, tujuan, dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan kepada panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke panitia eksekutif selanjutnya disusun dan dirancang draf kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 tahun 2002).

Pada dasarnya mekanisme penyusunan anggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

- a. Tahap penyusunan anggaran. Pada tahap ini semua unsur organisasi atau lembaga mengajukan usulan mengenai anggaran yang ada di lingkungannya masing-masing.
- b. Tahap pengesahan atau tahap penetapan anggaran pada tahap ini semua usulan dan masing-masing organisasi atau unsur organisasi atau unsur lembaga atau lembaga dibahas dan evaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau yang akan diperoleh dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak yang berwenang.
- c. Tahap Pelaksanaan Anggaran. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- d. Tahap Pemeriksaan atau Pengawasan Anggaran. Karena pelaksanaan anggaran tidak menutup kemungkinan berbeda dengan anggaran maka pelaksanaan anggaran perlu diawasi (Kusnadi, 1999:53-54).

II.4. karakteristik tujuan anggaran

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/ DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dan UUD '45 sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dapat persetujuan DPR/ DPRD.

Kajian teoritis sebagai dasar dalam penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan karena variabel-variabel yang diteliti masih menggunakan variabel penelitian pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar dalam mendukung penelitian ini. Adapun lima Budgetary Goal Characteristic (Kenis 1979) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Anggaran (*Budgetary Participation*)

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban. Organisasi sering mengikutsertakan manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran. Keikutsertaan para manajer ini sangat penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk ikut serta mencapai tujuan perusahaan. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan menyusun anggaran secara partisipasi diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975). Semakin tinggi tingkat keterlibatan

manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja (Indriantoro, 2000).

Menurut Brownell (1982) thiam Sardjiko dan Muthaher (2007) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam orgisasi yang melibatkan para manager dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi organisasi, hal ini diperoleh dari hampir penelitian tentang partisipasi. Sord dan Welsech (1995) sebagaimana yang disadur oleh Sardjito (2007) menggunakan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang tinggi pula.

Partisipasi telah ditunjukkan berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerja sama diantara manajer. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif legeslatif dan masyarakat berkerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam daerah yang berlaku Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja).

2. Kejelasan Sasaran Anggaran (*Budget Goal Clarity*)

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya (Kenis,1979). Penelitian dalam Kurnia (2004) menunjukkan hasil bahwa kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan.

Kejelasan Sasaran Anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggungjawab.

Kenis (1979) sebagaimana yang diatur oleh Munawar (2006) menyatakan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relative sangat kuat untuk meningkatkan Kejelasan Sasaran Anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Maryanti (2002) dalam Munawar (2006) menyatakan bahwa aparat pemerintah daerah propinsi NTT dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui Kejelasan Sasaran Anggaran dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa

anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Munawar, dkk (2006) menemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja aparat pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dibuat.

3. Evaluasi Anggaran (*Budgetary Evaluation*)

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979 dalam kurnia 2004). Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan kinerja manajer. Punitif approach dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negative, sedangkan suportif approach dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif.

Tse (1979) dalam kurnia (2004) menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu: 1) menyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

Kenis (1979) dalam Munawar (2006) menemukan bahwa manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam meningkatkan ketegangan kerja atau menurunkan kinerja anggaran.

Maryanti (2002) sebagaimana yang disadur oleh Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah propinsi NTT. Hal ini menunjukun bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun mereka tidak melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah.

Munawar, dkk (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kupang hal ini menunjukan bahwa dalam menyusun melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan mereka selalu takut dievaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan.

4. Umpan Balik Anggaran (*Budgetary Feedback*)

Kenis (1997) dalam Munawar (2006) menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manejer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dan upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih

baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas (Becker dan Green, 1962). Steers (1975) dalam Kurnia (2004) mengemukakan bahwa tethadap hubungan yang dan signifikan antara umpan balik anggaran dengan kinerja.

Maryanti (2002) sebagaimana yang disadur oleh Munawar (2006) menemukan bahwa umpan balik tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukan aparat pemerintah daerah propinsi NTT mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses.

5. Kesulitan Sasaran Anggaran (*Budget Goal Difficulty*)

Kenis (1979) dalam Munawar (2006) mengemukakan bahwa kesulitan sasaran mempunyai rentang sasaran dan sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai.

Merchant (1998) dalam Kurnia (2004) mengemukakan bahwa untuk tujuan motivasional, sasaran anggaran yang tempat adalah stretch target, yaitu sasaran yang ketat, yang tidak dapat dicapai apabila tidak ada tidak perubahan dalam sistem kerja.

Locke (1968) dalam Kurnia (2004) menyatakan bahwa sasaran anggaran yang lebih sulit akan mengakibatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sasaran anggaran yang lebih mudah. namun penelitian yang dilakukan Steers (1975) menunjukan hasil yang berbeda

yaitu tidak terdapat hubungan yang positif antara kesulitan sasaran anggaran dengan motivasi dan kinerja.

Maryanti (2002) dalam Munawar (2006) menyatakan bahwa aparat pemerintah daerah propinsi NTT tidak dipengaruhi oleh kesulitan sasaran anggaran, sehingga dalam mempersiapkan penyusunan anggaran tidak perlu memperhatikan mudah atau sulitnya anggaran yang ingin dicapai.

Munawar, dkk (2006) menemukan bahwa aparat pemerintah di kabupaten kupang tidak dipengaruhi oleh kesulitan anggaran, sehingga dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran tidak terlalu memperhatikan mudah atau sulitnya tujuan anggaran yang ingin dicapai.

II.5. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

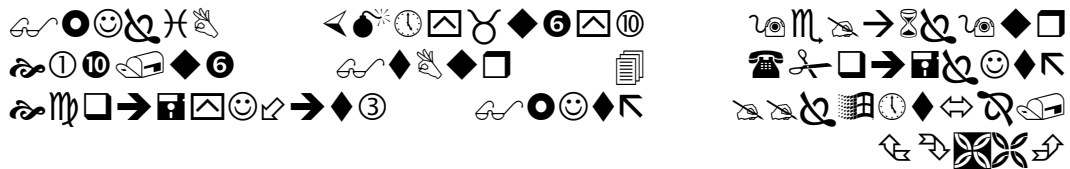
1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagai mana dikemukakan oleh Mangku Negara (2005 : 67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*job performance*), yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

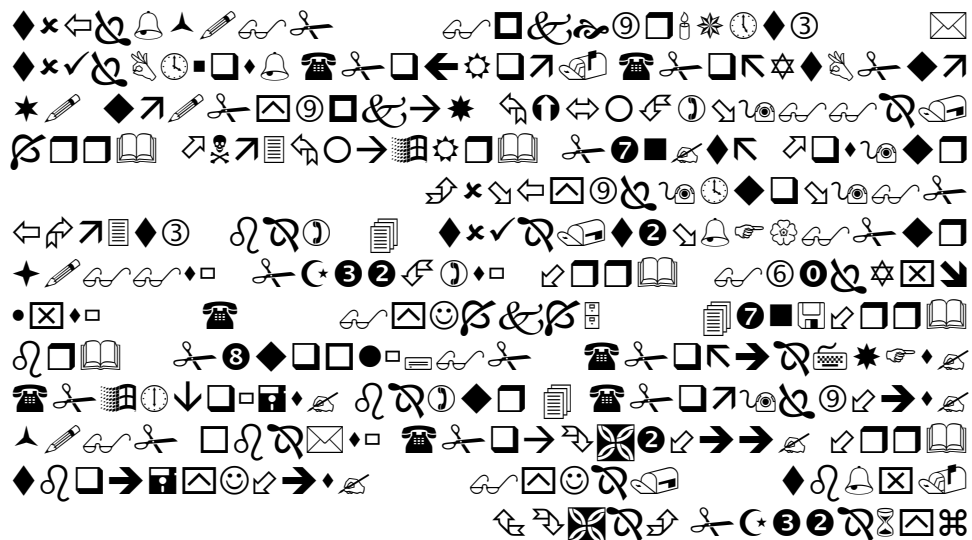
Kinerja menurut Indra Bastian (2005:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/ kebiasaan yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam priode waktu tertentu.

Seperti dalam surat al-An'Aam ayat 132



Artinya: Dan maing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan''. Dan dalam surat An-Nisa' ayat 135



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menfadi saksi Karena Alloh biarpun terhadap dinimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar bolikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Berdasarkan beberapa pengertian dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.

2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002 : 122), manfaat pengukuran kinerja sektor publik, yaitu:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

Topik tentangan pengukuran kinerja disektor publik mendapat perhatian yang cukup besar dan peneliti-peneliti terutama di negara-negara maju. Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan, dan produktifitas pada organisasi -organisasi sektor publik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan organisasi pelayanan publik, penilaian atau pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk menilai atau mengukur seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Pada instansi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, salah satu indikator penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah implikasinya terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

3. Aspek yang Diukur

Menurut Bastian (2001 : 276-277), setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut:

- a. Aspek finansial.
Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.
- b. Kepuasan pelanggan.
Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu jika dikaitkan dengan pemerintahan maka yang dilihat adalah kepuasan masyarakat bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Operasi dan bisnis internal.
Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan kegiatan organisasi mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum di dalam skema strategis.
- d. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata.

- e. Kepuasan komunitas dan shareholders/ stakeholders.
Pengukuran kinerja perlu disusun untuk mengamodasikan kepuasan dan para stakeholder 1.
- f. Waktu.
Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu di perhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan *relavan* dan *to date*.

II.6. Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan sikap seseorang yang menunjukkan kesetian atau loyalitas terhadap sesuatu hal. Winaldi (2006) mengungkapkan bahwa komitmen adalah:

- a. Kepercayaan dan pengakuan terhadap sasaran dan nilai dari organisasi atau profesi;
- b. Kemauan untuk mencari upaya yang tepat bagi organisasi atau profesi; dan
- c. Hasrat untuk memelihara keutuhan keanggotaan dalam organisasi atau profesi;

Menurut Pinem (2005 : 10) dalam Winaldi (2006), Komitme

Organisasi adalah sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri secara positif dengan organisasi.

Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong(reinforce) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya. Karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap loyal dari seorang karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja yang ditunjukkan dengan kemauan untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi organisasinya dan sekaligus menjaga keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Komitmen organisasi menunjukkan kekuatan relatif untuk berpihak dan terlibat dalam organisasi, keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk organisasi, termasuk juga keinginan untuk bertahan dalam organisasi. Jadi, komitmen organisasi merupakan orientasi individu terhadap organisasi dalam hal loyalitas, identifikasi dan keterlibatan.

Menurut Pinem (2003 ; 11) dalam Winaldi (2006) Komitmen organisasi para anggota organisasi terbentuk karena berbagai pengaruh baik dari intern maupun ekstern. Untuk pihak ekstern, biasanya oleh orang tua, guru dan rekan-rekan seseorang. Sikap orang tua misalnya, pada umumnya mempunyai peranan yang besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Biasanya orang tua dijadikan “model” dalam menentukan sikap seseorang.

Pengaruh seorang guru terhadap seorang anak juga merupakan pengaruh yang kuat. Seorang guru akan berusaha sekuat tenaga menanamkan sikap positif terhadap seorang anak. Jika pada saat itu, dasar yang kuat diterapkan maka sistem nilai dan sikap yang positif demikianlah yang akan dianut seseorang sepanjang hidup.

Rekan-rekan seseorang juga turut mempengaruhi kehidupan organisasi seseorang. Jika seseorang memilih rekan yang bersikap positif terhadap organisasi, maka secara langsung kemungkinan besar ia akan bersikap yang sama terhadap organisasi.

Selain secara ekstern, komitmen organisasi seseorang juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri, kemampuan berfikir, memilih dan berbagai faktor lainnya juga berpengaruh pada sikap seseorang untuk loyal atau tidak pada suatu organisasi.

11.7. Pendekatan Kontinjensi

Riyanto (2003) dalam Suhartono dan Solichin (2006) mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontinjensi dalam menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja. Sistem pengendalian termasuk sistem pengendalian akuntansi dan anggaran. Hasil penelitian-penelitian tentang hubungan karakteristik anggaran dengan aplikasinya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya.

Teori kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan.

Govindarajan (1986) dalam kurnia (2004) menyarankan digunakannya pendekatan kontinjensi yang memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang menjadi faktor moderating atau faktor intervening yang mempengaruhi

hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dan kinerja manajerial. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Sedangkan intervening adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu variabel dan mempengaruhi variabel lainnya. Dengan kata lain variabel intervening merupakan variabel perantara antara dua variabel.

11.8. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh karakteristik tujuan anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Michael dan Troy (2000) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akun tabel olah pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dan rencana strategis mereka dengan menggunakan input dan masyarakat/ publik. Jika input dan masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintah lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun.

Maryanti (2002) sebagaimana dikatakan oleh Munawar (2006), menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan Sasaran Anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan sasaran anggaran, tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah tidak spesifik dan tidak jelas yang membuat kinerja aparat pemerintah daerah menjadi rendah.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Munawar (2006) yang menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena semakin baik aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang turut berpartisipasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran dan menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah ditetapkan maka semakin baik kinerjanya.

Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Schiff dan Lewin (1970) dalam Sardjito dan Muthaher (2007) mengemukakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, Argyris (1952) dalam Sardjito dan Muthaher (2007), juga menyatakan bahwa kunci dan kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dan anggaran tercapai dan

partisipasi dan bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara karakteristik tujuan anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Komitmen organisasi dapat tumbuh karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menenima nilai yang ada serta tekad dan dalam dirinya untuk mengabdikan kepada organisasi. Wiener (1982) dalam Kurnia (2004), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan dan dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Komitmen organisasi yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi dan kemauan mengerahkan usaha atas nama organisasi akan meningkatkan kinerja (Noun dan Parker, 1998) dalam kurnia (2004).

II.9 Penelitian Terdahulu.

I. Penelitian yang Berkaitan Dengan karakteristik tujuan anggaran Dengan Kinerja Aparat Pemerintah.

Maryanti (2002) dalam Munawar (2006) menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran tidak berpengaruh secara serentak terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah adalah tidak spesifik dan tidak jelas yang membuat kinerja aparat pemerintah daerah menjadi rendah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Munawar (2006) yang menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

II. Penelitian yang Berkaitan Dengan karakteristik tujuan anggaran Dengan Kinerja Manajerial.

Kurnia (2004) mengemukakan bahwa sistem penganggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian manajerial. Organisasi termasuk Perguruan Tinggi memerlukan anggaran sebagai salah satu komponen penting, untuk menterjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Kenis (1979) dalam Kurnia (2004) mengemukakan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan evaluasi prestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2004) mengenai pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap kinerja manajerial dengan budaya paternalistik dan komitmen organisasi sebagai moderating variabel, menunjukkan karakteristik tujuan anggaran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

II.10 Hipotesis Penelitian

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

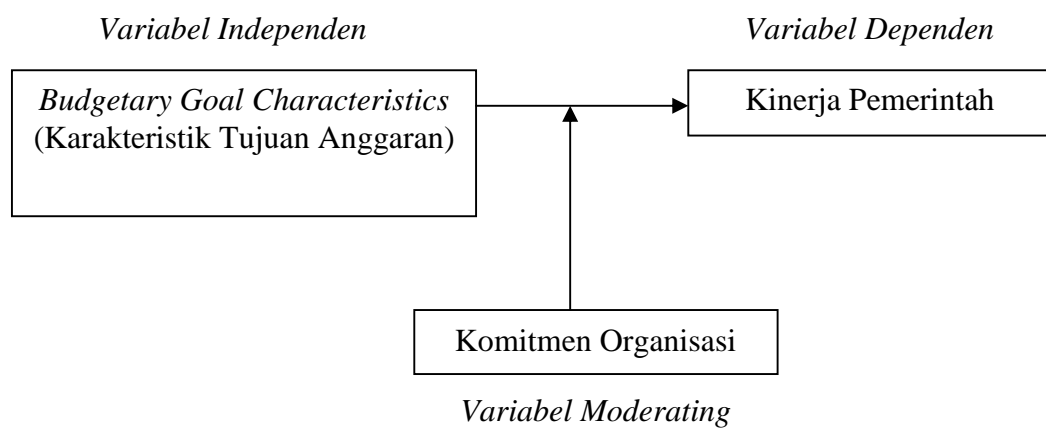
H₁ : *karakteristik tujuan anggaran* Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

H₂ : Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh *karakteristik tujuan anggaran* dengan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

II.11 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 1
Model Penelitian



BAB III

POPULASI DAN SAMPEL

I. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi/ badan pemerintahan yang ada pada Kabupaten Siak dan dilakukan pada tahun 2010.

III. 2 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009 : 115).

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas-Dinas Pemerintahan di Kabupaten Siak. Pemilihan badan, Dinas dan kantor dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah daerah, yang bearti menyusun menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dan pemerintah daerah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2009: 116). Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian-bagian (Eselon III dan kepala-kepala sub-bagian Eslon IV karena mereka menduduki jabatan teknis dan memiliki peranan yang besar terhadap pekerjaan di lapangan, dimana mereka berhubungan dan terjun langsung dalam pekerjaan teknis dilapangan. Dampaknya mereka memahami permasalahan dilapangan dan mengetahui lebih akurat mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam operasional kerja.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (pemilihan sample bertujuan). Pemilihan sampel bertujuan yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria yaitu, pejabat eselon III dan eselon IV yang ada di masing-masing Dinas pada kantor Dinas Pemerintahan di Kabupaten Siak.

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data dan responden yang cukup besar populasinya untuk menentukan sampel, maka penulis menerapkan teori Slovin, yang dikutip dari buku Husein Umar (2008: 67). Dengan populasi dan kepala bagian dan kepala sub bagian sebesar 237 orang, maka diperoleh sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Besar populasi, asumsi anggota sebesar 237

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10 %.

$$n = \frac{237}{1 + 237 \times 0,01}$$

$$n = \frac{237}{1 + 2,37}$$

$$n = \frac{237}{3,37}$$

$$n = 70,32$$

$$n = 71$$

Dinas-dinas yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut

Tabel III.1
Populasi dan sampel Penelitian

No.	Nama Instansi	Jurnal Populasi		Jumlah sampel	
		Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
1	Dinas Pendidikan	8	11	2	3
2	Dinas Kesehatan	4	16	1	4
3	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	6	6	1	2
4	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	7	9	2	3
5	Dinas Perhubungan dan Infokom	4	2	1	1
6	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	7	16	2	4
7	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	4	8	1	2
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah	5	9	1	3
9	Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga	6	15	1	4
10	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA)	8	12	2	4
11	Kepala Badan Kepegawaian	4	6	1	2
12	Kepala Badan Inspektorat	1	3	1	1
13	Kepala Badan Lingkungan Hidup	4	10	1	3
14	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	3	6	1	2
15	Kepala Kantor Penanaman Modal	1	3	1	1
16	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	1	1
17	Kepala Kantor Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	6	11	2	3
18	Kepala kantor kesbang politik dan linmas	1	3	1	1
19	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip	1	3	1	1
20	Kepala Kantor Satuan Polisi pamong praja	1	3	1	1
Jumlah		82	155	25	46

Sumber : Kantor pelayanan satu pintu
Kab.Siak

Berdasarkan jumlah populasi di atas, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari 25 responden kepala bagian dan 46 kepala sub bagian, jadi total sampel keseluruhan nya adalah 71 responden.

III.3. Pengukuran Variabel

Variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ilmiah ini antara lain: satu variabel independen yaitu karakteristik tujuan anggaran satu variabel dependen yaitu kinerja aparat pemerintah dan satu variabel moderating yaitu komitmen organisasi.

1. Karakteristik tujuan anggaran

Variabel karakteristik tujuan anggaran dan:

- a. Partisipasi penyusunan anggaran (*budgetary participation*) yaitu tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran.
- b. Kejelasan sasaran Anggaran (*budgetary goal clarity*) adalah luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian.
- c. Umpan balik anggaran (*budgetary feedback*) adalah hasil yang diperoleh dan upaya untuk mencapai sasaran sebagai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan.
- d. Evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*) adalah tingkat yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen.

- e. Kesulitan sasaran anggaran (*budget goal difficulty*) adalah rentang sasaran dan sangat longgar dan mudah dicapai sangat ketat dan tidak dapat dicapai.

Variabel karakteristik tujuan anggaran ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kenis (1979) seperti dalam penelitian Kurnia (2004). Namun, untuk variable partisipasi anggaran diukur dengan instrumen yang telah disesuaikan dengan sektor publik oleh Mardiasmo (2001) seperti dalam penelitian Fauziati (2002) dengan penilaian skala likert lima point, dimana skala rendah (1) menunjukkan rendahnya pengaruh *budgetary goal characteristics* dan skala tinggi (5) menunjukan tingginya pengaruh *budgetary goal characteristics*. Variable karakteristik tujuan anggaran diukur dengan 26 butir pertanyaan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan mengenai kejelasan alas sasaran anggaran, 3 butir pertanyaan mengenai umpan balik anggaran 10 butir pertanyaan mengenai evaluasi atas anggaran yang dilakukan, dan 5 butir pertanyaan mengenai kesulitan dalam mencapai anggaran.

2. Kinerja Aparat Pemerintah

Pengukuran kinerja tidak hanya sebatas pengukuran anggaran yang telah digunakan, namun juga mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan pendekatan kinerja, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang

diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (kepmendagri No 29 tahun 2002). Variabel kinerja diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Mardiasmo (2001) dalam Ningsih (2008).

3. Komitmen organisasi

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Variabel komitmen organisasi diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Mayer dan Allen (1984), telah di replikasi oleh Trisnaningsih (2000) dalam Ningsih (2008). Jumlah item pertanyaan adalah 12 item dengan skala likert 1-5

III.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang berhubungan dengan persepsi atau opini responden mengenai variabel yang diteliti dan data yang berhubungan dengan karakteristik responden.

Hasil dari penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggaran sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2002:146) data ini diperoleh langsung dari responden yang berupa opini individu terhadap suatu kegiatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui perantara), diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data sekunder digunakan dalam memperoleh nama dinas-dinas pemerintahan dan jumlah pegawai.

Sumber data dalam penelitian ini adalah para pejabat eselon III dan eselon IV setiap badan, dinas dan kantor yang ada di Pemerintah Kabupaten Siak.

III.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Kuisioner: Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis yang telah disusun peneliti terhadap responden yang digunakan sebagai salah satu pedoman untuk penelitian

III.6. Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Sebelum pengujian dilakukan terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji kualitas data, yaitu **pengujian validitas** (**validity test**) dan **pengujian reabilitas** (*reability test*). Validitas penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang diukur. Ketentuan validitas data dapat menggunakan korelasi pearson. Masing-masing jawaban pertanyaan dan total jawaban pada setiap variabel penelitiannya saling dikorelasikan. Hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan r tabel, pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen tersebut adalah valid dan sebaliknya jika r hitung negatif dan r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrumen tersebut tidak valid (Pratisto, 2004).

Jika validitas telah diperoleh, maka peneliti harus mempertimbangkan pula reabilitas pengukuran. Pengujian reabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliable akan menunjukkan instrumen yang sudah dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dipercaya pula.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cronbach alpha yaitu untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alfa apabila lebih dari 0,5 (Nunnaly, dalam Darlis, 2005).

2. Uji Normalitas Data

Sebelum menganalisis data, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multipariate. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen dan variabel moderating atau ketiganya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data tidak normal, maka tes statistic yang dihasilkan tidak valid. Model regresi dikatakan baik apabila distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004: 212).

Deteksi dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu normal *probability-plot of regression standardized residuals*. Jika data menyebar disekitar garis-garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. (Santoso, 2004:214)

III. 7. Uji Asumsi Klasik

0. Uji Autokorelasi

Menurut Sumoningrat (2001 ; 31), Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dalam serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (Time Section Data) dalam penelitian ini data yang digunakan adalah cross section Data, artinya data tersebut dikumpulkan dalam satu waktu. Konsekuensi dan adanya autokorelasi dalam satu model regresi adalah varians sampel tidak menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi model regresi yang

dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel indenpeden tertentu. Suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi telah dikembangkan oleh j. 2004; dengan rumus sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_1 - e_2)^2}{\sum_{t=2}^{t=n} e_1^2}$$

Keterangan

E_t = Kesalahan gangguan dari sampel

Untuk mengetahui batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model regrasi tersebut adalah $du < d < 4-du$, damana du adalah batas atas dari nilai d . Durbin Watson yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson dan hasil perhitungan yang dilakukan. Jika d dihiting tidak berada di antara batas tersebut, maka tidak terjadi penyimpangan autokorelasi.

Santoso (2004 ; 218) mengatakan bahwa deteksi adanya autokorelasi secara umum dapat dilihat dengan:

- a. Jika angka Durbin-Watson (DW) DIBAWAH -2 bearti terdapat autokorelasi positif.
- b. Jika angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai +2 bearti tidak ada autokorelasi
- c. Jika angka durbin-Watson (DW) diatas +2, bearti ada autokorelasi negatif.

1. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain, pengujian ini dapat dilihat dari grafik Scatterplot, dengan ketentuan:

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterosdastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Uji Multikolenearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antara variable-variable bebas (variable indenpenden) dalam model regresi, maka terdapat problem multikolinearitas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable bebas (variable independen).

Pengujian keberadaan multikolinearitas dilakukan dengan mengamati (Santoso,2004:2006):

- a. Besaran *variant inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Model dikatakan bebas *multikofmearitasjika* VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1.
- b. Besaran korelasi antara variable independen. Koofisien antar variable independen. Koofisien korelasi antar variable independen haruslah

lemah (dibawah 0,5). ilka korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinearitas.

III.8. Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh menguji hipotesis ini digunakan regresi linear berganda. Fokus utama regresi pada penelitian ini adalah signifikan indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi variabel moderating (komitmen organisasi) dengan karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

1. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sample dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk menguji apakah variable moderating sebagai variable antara mempunyai pengaruh secara pasrial terhadap variable independen dan variable dependen.

Pengujaan ini dilakukan dengan tingkat signifikan () 5% dan dengan degree of freedom (df) = $n - k$, membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, bearti bahwa variabel moderating mempunyai pengaruh terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_0 ditolak, berarti variabel moderating tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan variabel indepanen dan variable dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. 1. Deskripsi dan Analisa Data

Untuk mengawali langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendatangi masing-masing dinas yang ada di Kabupaten Siak dan menyerahkan surat riset serta satu set kuesioner kepada pihak dinas untuk dipelajari. Apabila pihak dinas setuju dan bersedia dinas dijadikan objek penelitian, maka selanjutnya kuesioner tersebut diserahkan kepada masing-masing responden.

Kuesioner yang berjumlah 71 set yang telah disebarkan pada 20 dinas yang ada di Kabupaten Siak. Masing-masing dinas diberi kuesioner sesuai dengan jumlah yang ada yang ditujukan kepada pejabat eselon III dan eselon IV yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Dari 20 dinas yang telah dikirimkan kuesioner sebanyak 71 buah dalam penelitian ini, semuanya (100%) menerima kuesioner yang diserahkan. Dari 71 kuesioner yang dikirim, yang kembali sebanyak 65 set (91,54%) sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 6 set (8,45%) buah. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan 5 set (7,04 %) buah kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap, maka jumlah kuesioner yang dapat dianalisa adalah sebanyak 60 buah. 6 set (8,45%) kuesioner yang tidak kembali disebabkan oleh kesibukan aktivitas dan kelalaian beberapa subjek. Berdasarkan tingkat pengembalian sebesar 84,50 % (60 kuesioner), maka peneliti menganggap sudah layak untuk dilakukan pengolahan data. Kuesioner

yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 60 buah (84,50 %). Tingkat pengembalian kuisisioner dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.I

Tingkat Partisipasi Objek Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.

No	Deskripsi penyebaran kuisisioner	Jumlah	Persentase
1	kuisisioner yang di sebar	71	100%
2	Kuisisioner yang di kembalikan	65	91,54%
3	Kuisisioner yang tidak di kembalikan	6	8,45%
4	Kuisisioner yang tidak dapat di olah	5	7,04%
5	Kuisisioner yang dapat di olah	60	84,50%

Sumber : pengolahan data penelitian

Dari segi lama masa kerja PNS responden yang berkisar 1-5 tahun terdapat 21 orang (32%) responden, 28 orang (49%) responden yang berkisar 6-10 tahun, 11 orang (19%) responden yang berkisar 11-15 tahun lama masa kerjanya sebagai PNS. Sementara itu, berdasarkan lamanya menduduki jabatan, terdapat 35 orang responden (57%) yang berkisar 1-5 tahun, 25 orang responden (43%) yang berkisar 6-10 tahun menduduki jabatan. Berdasarkan jabatan yang disandang sebagai eselon III terdapat 23 orang responden. Sedangkan sebagai eselon IV terdapat 37 orang responden. Rincian mengenai lama masa kerja sebagai PNS, lama menduduki jabatan dan jabatan yang disandang responden dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.2
Demografi Responden

Ukuran Sampel	Frekuensi	Persentase
	60	100 %
Lama masa kerja sebagai PNS		
• 1 sampai 5 tahun	21	32 %
• 6 sampai 10 tahun	28	49 %
• 11 sampai 15 tahun	11	19 %
Lama menduduki jabatan		
• 1 Sampai 5 tahun	35	57 %
• 6 Sampai 10 tahun	25	43 %
• 11 Sampai 15 tahun	0	0 %
Jabatan		
• Eselon III	23	42 %
• Eselon IV	37	58 %

Sumber: Pengolahan data Penelitian

IV. 3. Statistik Diskriptif

Analisis yang dilakukan terhadap 60 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Data yang di olah merupakan hasil rata- rata jawaban responden dari setiap factor individu yang terdiri dari karakteristik tujuan anggaran, kinerja pemerintah daerah dan komitmen organisasi yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Statistik diskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel IV. 3 berikut:

Tabel IV.3
Statistik Diskriptif

	Karakteristik tujuan anggaran	Kinerja Pemerintah Daerah	Komitmen Organisasi
N	60	60	60
Mean	100.7833	70.5000	47.7000
Median	102.5000	70.5000	47.0000
Std. Deviation	11.64313	8.28619	6.47106
Minimum	81.00	53.00	37.00
Maximum	124.00	87.00	60.00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat *bahwa* karakteristik tujuan anggaran mempunyai nilai rata rata jawaban responden adalah 100.7833 dengan standar divisi 11.64313 jika jawaban responden lebih tinggi dari 70.5000 maka hubungan variabel penelitian budgetary goal characteristics cenderung lebih tinggi. komitmen organisasi mempunyai nilai rata rata jawaban responden adalah 47.7000 dengan standar deviasi 6.47106 Jika jawaban responden lebih tinggi dari 6.47106 maka komitmen organisasi cenderung lebih tinggi.

IV. 4. Pengujian Kualitas Data

Informasi yang objektif dan akurat dalam penelitian soal biasanya tidak mudah diperoleh. Terutama karena konsep mengenai variabel yang diukur tidak selalu mudah untuk dioperasionalisasi atribut dan variabel tersebut dilakukan semestinya, tetapi itu saja tidak cukup menentukan bahwa penelitian menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, karena yang menjadi penentu adalah adanya pengujian validitas reliabilitas atas instrumen yang digunakan

1. Validitas

Berdasarkan uji validitas butir-butir pernyataan dalam kuisioner penelitian ini menggunakan *Corrected item-Total Correlation* melalui aplikasi SPSS versi 17.0 *for windows* (Sulistyo : 2012).

Koefisien korelasi antara butir-butir pernyataan berkaitan dengan variabel karakteristik tujuan anggaran, dengan skor total berkisar antara 0,268-0,664. Koefisien antara butir pernyataan yang berkaitan dengan

variabel kinerja pemerintah daerah dengan skor yang berkisar antara 0,257-0,526. Koefisien antara butir pernyataan berkaitan dengan variabel komitmen organisasi dengan skor total berkisar antara 0,266-0,563.

Untuk mengetahui validitas setiap butir pernyataan pada kuesioner, maka r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} . Jika r_{hitung} lebih besar dengan r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid atau dapat digunakan dalam sebuah penelitian (Sulistyo : 2010). Hasil dari validitas butir pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.5, IV.6, IV.7.

Karakteristik tujuan anggaran terdiri dari 26 pernyataan, berdasarkan hasil perhitungan *Corrected item-Total Correlation* setiap butir pernyataan totalnya diperoleh hasil berkisar antara 0,268-0,664 hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan tersebut lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,254 taraf signifikan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan pada instrumen karakteristik tujuan anggaran adalah valid dan setiap butir pernyataan memiliki *Corrected item-Total Correlation* yang positif, hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari tabel IV.4, berikut ini:

Tabel IV.4
Validitas Instrumen karakteristik tujuan anggaran

Item Pernyataan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	96.8333	122.209	.485	.800
VAR00002	96.7167	125.495	.497	.802
VAR00003	96.7333	126.165	.367	.806
VAR00004	97.4167	124.112	.323	.808
VAR00005	96.9667	123.185	.423	.803
VAR00006	97.1333	121.033	.467	.801
VAR00007	97.4167	125.366	.300	.809
VAR00008	97.3833	126.444	.291	.809
VAR00009	96.9000	126.566	.358	.806
VAR00010	96.8167	125.779	.423	.804
VAR00011	97.0000	128.203	.312	.808
VAR00012	96.6667	125.345	.489	.802
VAR00013	96.6833	127.712	.278	.810
VAR00014	96.9000	125.346	.329	.808
VAR00015	96.5000	128.831	.333	.808
VAR00016	96.6500	133.214	.664	.817
VAR00017	96.9000	135.142	.338	.824
VAR00018	97.4333	125.504	.268	.812
VAR00019	96.9833	130.390	.555	.815
VAR00020	96.6500	132.435	.422	.815
VAR00021	96.7500	128.428	.369	.807
VAR00022	96.8333	124.277	.436	.803
VAR00023	96.8000	122.163	.472	.801
VAR00024	96.9667	122.033	.526	.799
VAR00025	96.8333	122.209	.485	.800
VAR00026	96.7167	125.495	.497	.802

Kinerja pemerintah daerah terdiri dari 18 pernyataan, berdasarkan hasil perhitungan *Corrected item-Total Correlation* butir pernyataan total

nya diperoleh hasil berkisar antara 0,257-0,526. hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan tersebut lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,254 taraf signifikan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan pada instrumen kinerja pemerintah daerah valid dan setiap butir pernyataan memiliki *Corrected item-Total Correlation* yang positif, pengujian tersebut dapat dilihat dari tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Validitas Instrumen Kinerja Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	66.8667	60.626	.323	.761
VAR00002	66.4833	62.051	.373	.756
VAR00003	66.6833	60.966	.459	.750
VAR00004	66.6667	64.158	.299	.769
VAR00005	66.5000	60.119	.526	.745
VAR00006	66.7000	60.654	.502	.747
VAR00007	66.3500	62.503	.398	.755
VAR00008	66.2500	64.258	.323	.766
VAR00009	66.6000	60.312	.369	.756
VAR00010	66.1833	62.796	.417	.754
VAR00011	66.8333	61.904	.257	.767
VAR00012	66.4833	62.864	.318	.760
VAR00013	66.6667	61.785	.404	.754
VAR00014	66.6333	63.456	.271	.763
VAR00015	66.5167	61.847	.397	.754
VAR00016	66.6500	61.960	.395	.754
VAR00017	66.8500	62.130	.349	.767
VAR00018	66.5833	63.027	.286	.762

Komitmen organisasi terdiri dari 12 pernyataan, berdasarkan hasil tabel perhitungan *Corrected item-Total Correlation* setiap butir pernyataan

totalnya diperoleh hasil berkisar antara 0,266-0,563 . hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan tersebut lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,254 taraf signifikan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan pada instrument komitmen organisasi adalah valid dan setiap butir pernyataan memiliki nilai *Corrected item-Total Correlation* yang positif. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6
Validitas Instrumen Kinerja Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	44.0500	35.675	.306	.775
VAR00002	43.6833	36.084	.419	.758
VAR00003	43.9000	35.481	.483	.752
VAR00004	43.8167	37.068	.316	.769
VAR00005	43.7333	34.775	.562	.744
VAR00006	43.9167	34.891	.563	.744
VAR00007	43.5833	35.806	.514	.750
VAR00008	43.6000	37.261	.266	.775
VAR00009	43.8167	34.254	.443	.756
VAR00010	43.4167	35.942	.548	.748
VAR00011	43.7667	35.538	.353	.767
VAR00012	43.4167	38.112	.314	.768

2. Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien cronbach alpha > r_{tabel} . Hasil pengujian reliabilitas dari instrument

karakteristik tujuan anggaran, kinerja pemerintah daerah dan komitmen organisasi dapat dilihat dari tabel IV. 7 berikut ini:

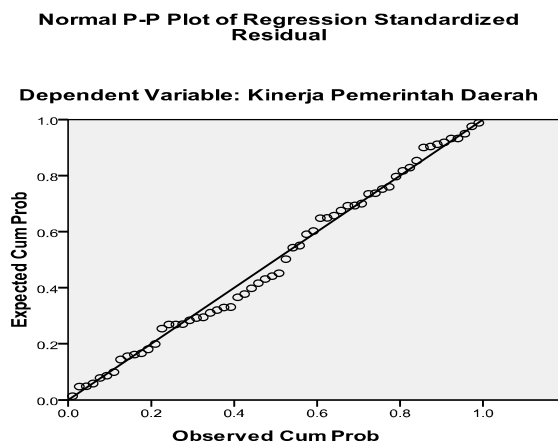
Tabel IV.7
Validitas Instrumen Kinerja Pemerintah Daerah

Instrumen Alat Ukur	Koefisien Cronbach Alpha	r _{tabel}
Karakteristik tujuan anggaran	0.813	0,254
Kinerja pemerintah daerah	0.775	0,254
Komitmen organisasi	0.768	0,254

Berdasarkan tabel IV 7 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrument karakteristik tujuan anggaran menunjukkan *cronbach alpha* sebesar 0.813, reliabilitas terhadap instrumen kinerja pemerintah *cronbach alpha* 0.775 dan instrument komitmen organisasi menunjukkan *cronbach alpha* 0.768 dari ketiga instrument tersebut, semua *cronbach alpha* lebih besar dari r_{tabel} ($\alpha > r_{\text{tabel}}$) sehingga dapat disimpulkan semua variabel penelitian ini adalah reliable.

IV. 5. Pengujian Normalitas Data

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dapat di lihat dari penyebaran data (titik) sumbu diagonal dari grafik p-p plot of regrissien standardized residual. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalis data dan sebaik nya jika data (titik) tersebar secara acak dan tidak berada disekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. normal probaloty plot pada penelitian terlihat pada gambar IV 1 berikut ini:

Gambar IV.I

Dari gambar IV.1 dapat dilihat bahwa data (titik) tersebut menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jalur dari garis) maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi.

IV. 6. Pengujian Asumsi klasik

1. Multikolinearitas

Dengan menggunakan software SPSS 17.0 maka, deteksi adanya multikolinearitas dapat di lihat dari nilai varian inflarian factor (VIF). VIF merupakan kebaikan dari toleransi. Artinya ketika toleransi kecil maka nilai VIF akan besar selain itu, deteksi multikolinearitas bias juga dilihat dengan nilai VIF dan toleransi. Suatu model dikatakan bebas dari adanya multikolinearitas apabila nilai VIF disekitar angka 1 dan 2 dengan nilai toleransi mendekati 1.

Tabel IV.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Karakteristik tujuan anggaran	.478	2.093
Komitmen Organisasi	.478	2.093

Dilihat dari tabel IV.8 hasil uji multikolinearitas diatas, variabel independen (karakteristik tujuan anggaran) memiliki nilai VIF 2,093 nilai toleransi 0,478 sedangkan variabel moderating (komitmen organisasi) memiliki nilai VIF 2,093 dengan nilai toleransi 0,478 dari kedua nilai VIF variabel independen tersebut kecil dari 5 dan sekitar angka 2, sedangkan nilai toleransi mendekati 1, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi atau bebas dari pengaruh multikolinearitas.

2. Autokorelasi

Statistik Durbin Watson digunakan untuk menguji autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh nilai durbin Watson sebesar. Nilai ini berada diantara -2 sampai +2, sehingga model regresi tersebut bebas dari adanya autokorelasi. Nilai durbin Watson dapat dilihat dari tabel IV.9. berikut:

Tabel IV.9
Nilai Durbin Watson
Model Summary^b

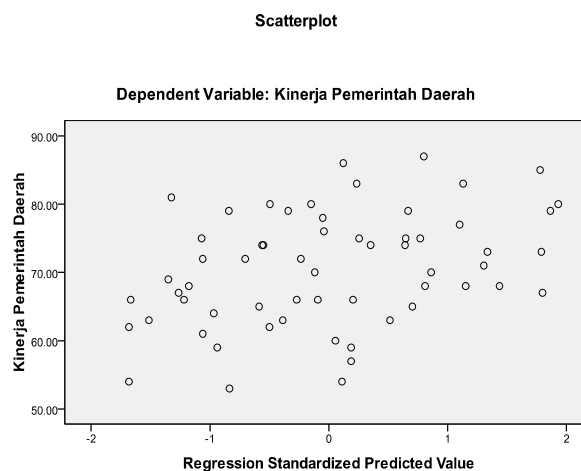
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 ^a	.137	.106	7.83366	1.537

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, karakteristik tujuan anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

3. Heteroskedastisitas

Diagnosa adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot yang diperoleh dengan bantuan *software spss* versi 17.0. menurut sentoso (2002) heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik (point-point) pada grafik scatterplot membentuk pola tertentu (bergelombang, menyebar, kemudian menyempit). Sedangkan jika titik-titik tersebut menyebar dan tidak jelas bentuknya maka model tersebut bebas dari heteroskedastisitas.



Dari gambar IV.2 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebarkan secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

IV. 7. Model penelitian yang digunakan

Pengolahan data ini menggunakan multi regression dengan bantuan program SPSS (statistical product service solution) versi 17.0. dalam melakukan analisis regresi ini dilakukan dengan metode enter.

1. Metode Enter

Pada metode enter, semua variabel independen digunakan sebagai predictor atau kriteria dalam penelitian ini. Tidak ada variabel yang dikeluarkan untuk menentukan pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah kabupaten siak. Gambaran umum hasil regresi dengan metode enter dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut:

Tabel IV.10
Hasil Analisa Regresi Metode Enter

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.341	9.037		5.239	.000
	Karakteristik tujuan anggaran	.016	.127	.022	.124	.902
	Komitmen Organisasi	.452	.228	.353	1.984	.052

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel IV.11
Variabel /Removed(b)

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komitmen Organisasi, karakteristik tujuan anggaran ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Dengan menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dikeluarkan pada mosel ini, hal ini dapat dilihat pada tabel IV .9 dan IV.10 maka persamaan regresi adalah:

Hipotesis pertama (H_1) akan di uji dengan persamaan regresi

$$(1) Y = B_0 + B_1.X_1 + e$$

Hipotesis kedua (H_2) akan di uji dengan persamaan regresi

$$(2) Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 (X_1 \times X_2) + e$$

Dimana:

Y = kinerja

B_0 = Konstanta

$B = (1, 2, 3,)$ Koefisien regresi masing – masing x

X_1 = Partisipasi anggaran

X_2 = Komitmen organisasi

(X_1X_2) = nilai interaksi antara partisipasi anggaran dengan
komitmen organisasi

e = error item

IV. 8. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS (*Statistical product and service solution*) versi 17.0. metode analisis yang digunakan adalah metode enter yaitu metode analisis bisa dimana semua variabel independen termasuk variabel moderating sebagai variabel predictor tanpa memandang apakah variabel tersebut berpengaruh besar atau kecil pada variabel dependen. adapun hasil analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel IV.12 Berikut:

Tabel IV.12
Hasil Pengujian Masing-Masing Hipotesis

Hipotesis	Adjusted R Square	F Change	Sig. F Change	t _{hitung}	t _{tabel}	Koefisien b	Keterangan
Hipotesis 1	0.061	4.832	0.032	2,198	2,001	0,197	Signifikan

Hipotesis 2	0,106	4,507	0,052	1.984	2,001	0,452	Tidak signifikan
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

IV. 9. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, apakah semakin meningkat karakteristik tujuan anggaran maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat pula.

Hasil analisis regresi pada hipotesis pertama menunjukkan b_1 pada persamaan regresi pertama tidak signifikan. Karakteristik tujuan anggaran tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah

Dimana:

Nilai t_{hitung} sebesar 2,198

Nilai t_{tabel} sebesar 2,001

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,198 > 2,001) maka H_0 di tolak

Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten siak.

IV. 10. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dari penelitian ini adalah apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah.

Dimana:

Nilai t_{hitung} sebesar 1,984

Nilai t_{tabel} sebesar 2,001

Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,984 < 2,001) maka H_0 diterima

Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara *budgetary goal characteristics* dengan kinerja pemerintah daerah kabupaten siak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik (karakteristik tujuan anggaran) daerah Kabupaten Siak dalam menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggung jawabkan anggaran sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD visi misi, tujuan pokok dan fungsi instansi, serta sasaran dan tujuan masing-masing instansi maka kinerjanya di anggap baik, dipengaruhi oleh komitmen organisasi.

Secara keseluruhan Adjusted R^2 menunjukkan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi sebesar 0,106 (10,6%) sedangkan 0,894 (89,4%) dipengaruhi oleh variabel lain, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan di pengaruhi oleh komitmen organisasi variabel moderating.

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung hasil penelitian Munawar 2006 yang menyatakan bahwa karakteristik budget goal characteristics secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Maryanti (dalam Munawar : 2006) menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran tidak berpengaruh secara serentak terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah adalah tidak spesifik dan tidak jelas yang membuat kinerja aparat pemerintah daerah menjadi rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

IV. 1. Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

1. Hasil pengujian pertama dari dalam penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu sebesar 6,1 % dengan tingkat signifikan sebesar 0,032
2. Hasil pengujian hipotesis kedua dari penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai variabel moderating tidak mempunyai pengaruh hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja pemerintah kabupaten Siak, hal ini terlihat pada tingkat signifikan sebesar 0,052
3. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabelitas untuk seluruh butir pernyataan penelitian telah memberikan hasil yang baik dan patut menunjukkan alpha berkisar antara 0,775 – 0,813. Pengujian validitas terhadap seluruh butir pernyataan dengan menggunakan *Corrected item-Total Correlation* menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki tingkat validitas yang baik.
4. Normal rata-rata jawaban responden yang menjadikan data dalam penelitian ini dilihat dari normal probability plot menunjukkan bahwa

distribusi jawaban responden adalah normal. Sehingga persyaratan normal terpenuhi.

V. 2. Saran

Mengingat rendahnya kualitas kerja, khususnya kinerja sector public perlu diperhatikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para Eselon III (kepala bagian) dan kepala Eselon IV (kepala sub bagian) harus meningkatkan kemampuan dan penguatan tentang system penganggaran dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran, seminar atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik formal maupun informal, sehingga kinerja paea eselon III (kepala bagian) dan eselon IV (kepala sub bagian) dapat lebih efektif dan lebih efisien dalam penyusunan anggaran dipemerintah daerah kabupaten siak.
2. Faktor karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja pemerintah disertai dengan komitmen organisasi kemungkinan menjadi factor kondisional yang harus di pertimbangkan dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi melalui kinerja aparatur dalam menyusun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengandaian kitab suci al-qur an departemen agama RI 1994 dan terjemahnya
Jakarta : seve indah press(surat an-am:132 dan an nisa: 135
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sekior Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Darlis, Edvan. 2001. *Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Simposium Nasional IV Kompartemen Akuntan Pendidik Ikatan Akuntan Indonesia*. Bandung
- Darma, E. S. 2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. (UPP AMP YKPN).
- Umarz Husein, 2008. *Desain Penelitian Akutansi Keprilakuan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*
- sugiono, Alfabeta.2008. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. bandung:
- Keputusan Mentri daiam Negeri NO. 2 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD. Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Kurnia, Ratnawati. 2004. *Pengaruh Budgetary Goal Characteristis Terhadap Kinerja Managerial dengan Budaya Patemalistlk dan Komitmen Orgamsasl Sebaga Moderating Variabel*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali.
- Bastan,indra. 2005. *Akuntansl Pemerintahan (Publik)*. Malang: Universitas Irawijaya
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.

Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138

Supriyono, R. A. 2001. *Akuntansi Manajemen I Edisi 1*. BPFE. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta

Winaldi, Rafly. 2006. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran*. Skripsi UNRI